



PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Desember 2020

Daftar Isi

PENGANTAR	3
TENTANG BUKU PANDUAN INI.....	5
CARA MENGGUNAKAN BUKU PANDUAN INI	6
BAGIAN I: KONDISI ANAK DI INDONESIA	7
ANAK-ANAK DI SEKTOR SAWIT INDONESIA	7
KERANGKA HUKUM INDONESIA TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK	8
BAGIAN II: MEMBUAT KEBIJAKAN DAN PROSEDUR UNTUK MELINDUNGI ANAK	19
1. MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO PERLINDUNGAN ANAK.....	20
2. MELAKUKAN ANALISIS KESENJANGAN DAN PRAKTIK SAAT INI.....	21
3. KEMBANGKAN KOMITMENT KEBIJAKAN	22
4. KEMBANGKAN RENCANA IMPLEMENTASI.....	23
5. TETAPKAN STRUKTUR PELAPORAN	25
6. BERIKAN PANDUAN BAGI KARYAWAN TENTANG CARA MENGAMBIL TINDAKAN	26
BAGIAN III: MENERAPKAN PEDOMAN TINDAKAN REMEDIASI PEKERJA ANAK.....	27
SITUASI PEKERJA ANAK DI INDUSTRI SAWIT INDONESIA.....	27
APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEKERJA ANAK?.....	27
KLAUSA 'TANPA PEKERJA ANAK' WILMAR.....	28
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR UNTUK MENCEGAH ADANYA PEKERJA ANAK.....	29
PEDOMAN TINDAKAN PERBAIKAN.....	30

Pengantar

Semua anak, di mana pun mereka tinggal dan bagaimana pun kondisinya, memiliki hak untuk dilindungi, diasuh, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam [Konvensi Hak-hak Anak](#) (*Convention on the Rights of the Child*, atau disingkat CRC). Sebagai perwujudan komitmen untuk menangani kesejahteraan dan mendorong dihormatinya hak-hak anak di industri kelapa sawit Indonesia, Wilmar International memperkenalkan [Kebijakan Perlindungan Anak](#) pada tahun 2017. Kebijakan tersebut memaparkan komitmen Wilmar untuk melindungi semua anak dalam kegiatan operasional dan rantai pasoknya. Semua pemasok dan kontraktor Wilmar juga diharapkan untuk berkomitmen dan mematuhi kebijakan tersebut.

Untuk memandu dan membantu para pemasok dan kontraktor Wilmar untuk mengikuti Kebijakan Perlindungan Anak, Wilmar membuat Buku Panduan Implementasi Perlindungan Anak untuk membahas isu-isu perlindungan anak dan membentuk praktik terbaik dengan mengembangkan kebijakan, prosedur, dan tindakan perbaikan terkait. Walaupun tujuan utama panduan ini adalah untuk membantu pemasok dan kontraktor Wilmar dalam penerapan perlindungan anak, buku ini juga diharapkan dapat digunakan dan disebarluaskan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik Perlindungan Anak di industri pertanian.

Kebijakan Perlindungan Anak Wilmar didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak (CRC) dan memberikan kerangka yang komprehensif untuk perlindungan, penyediaan kebutuhan, dan partisipasi semua anak tanpa diskriminasi untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan mereka.



Apa itu Perlindungan Anak dan Mengapa itu Penting untuk Bisnis Anda?

Perlindungan anak adalah perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran. Perlindungan anak penting untuk bisnis yang bersentuhan langsung dan tidak langsung dengan anak. Penetapan kebijakan dan prosedur perlindungan anak dapat membantu menciptakan bisnis yang 'aman bagi anak' yang dapat mencegah dan menanggapi kejadian yang tidak disengaja dan disengaja membahayakan anak-anak.

Dengan kebijakan dan praktik yang diarahkan pada pencegahan bahaya, anak-anak akan merasa aman, dihormati, dan didengarkan. Ketika anak-anak dilindungi, keluarga menjadi lebih aman dan anak-anak lebih mampu untuk berkembang. Hal ini penting bagi perusahaan yang memiliki karyawan dan keluarganya yang tinggal di lokasi, karena perlindungan anak dapat menstabilkan tenaga kerja, dan menciptakan suasana kerja yang aman dan menyenangkan. Selain itu, pendekatan proaktif untuk melindungi kesejahteraan anak-anak akan meminimalkan risiko hukum dan reputasi serta gangguan rantai pasokan sambil membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan bisnis yang berkelanjutan.

Prinsip dan Kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diperbarui sekarang mewajibkan anggota untuk memiliki kebijakan perlindungan anak formal, proses terdokumentasi untuk bukti usia, dan pelatihan bagi staf perusahaan tentang perlindungan anak¹. Oleh karena itu, mengadopsi kebijakan dan pendekatan yang kokoh terhadap perlindungan anak memiliki manfaat tambahan dalam mendukung kepatuhan terhadap skema sertifikasi RSPO.

Apa yang dimaksud dengan Hak-Hak Anak?

Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak menyatakan bahwa semua bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan mendukung hak anak. Hak-hak anak adalah hak mendasar. Perlindungan khusus harus diberikan kepada semua anak untuk memastikan mereka bisa berkembang dengan bahagia dan sehat tanpa takut akan bahaya, diskriminasi atau eksploitasi.

Hak-hak anak diatur di dalam beberapa perjanjian internasional, yang mana Konvensi Hak-hak Anak (CRC) adalah yang paling penting dan memegang kewenangan tertinggi. CRC mencakup berbagai hak termasuk hak-hak sipil, keluarga, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, rekreasi, permainan, dan budaya. Penting dicatat bahwa CRC menetapkan prinsip "Dalam semua tindakan mengenai anak-anak kepentingan anak tersebut perlu menjadi pertimbangan utama."

¹ Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2018, kriteria 6.4

Hak-hak anak juga dijabarkan dalam:

- Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 138 tentang Usia Minimum
- Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW)
- Protokol Opsional untuk CRC tentang penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak
- Panduan RSPO tentang hak anak bagi produsen minyak sawit
- Seluruh hukum nasional dan peraturan daerah yang berlaku



Tentang Buku Panduan ini

Panduan ini dimaksudkan untuk membantu badan usaha berikut yang berhubungan dengan anak-anak di komunitas kelapa sawit, untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi anak-anak dan memastikan dihormatinya hak-hak anak.

- Semua operasi Wilmar di seluruh dunia, termasuk anak perusahaan kami
- Semua pemasok pihak ketiga

Semua karyawan, pemasok, dan kontraktor Wilmar wajib mematuhi Kebijakan Perlindungan Anak Wilmar. Buku panduan ini terutama relevan untuk perlindungan anak-anak yang menggunakan semua layanan yang dikelola Wilmar (termasuk sekolah, fasilitas penitipan anak, klinik, dan sarana transportasi).

Buku panduan ini menunjukkan bagaimana Wilmar dan para pemasoknya akan memenuhi kewajiban hukumnya dan memberikan kepastian kepada karyawan, pemasok, kontraktor, dan masyarakat umum tentang apa yang diharapkan dari Wilmar dan pemasoknya dalam menghormati hak-hak anak. Sejalan dengan hal tersebut, buku panduan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesadaran akan isu-isu perlindungan/hak anak yang paling menonjol di industri sawit Indonesia;
- Memberikan kesempatan bersuara mengenai masalah apapun melalui prosedur yang telah ditetapkan
- Memastikan bahwa semua laporan pelanggaran atau potensi pelanggaran kebijakan ini ditangani secara serius dan efektif, dengan menempatkan kepentingan anak sebagai faktor penentu utama;
- Menempatkan sistem pemantauan yang efisien untuk melacak kemajuan; dan
- Memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan, pemasok, dan kontraktor tentang penerapan Kebijakan Perlindungan Anak.

Kebijakan Perlindungan Anak Wilmar selanjutnya akan disebut sebagai "Kebijakan" di seluruh buku panduan ini.

Cara menggunakan Buku Panduan ini

Buku panduan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang perlindungan anak dalam konteks industri sawit Indonesia dan untuk memberikan pedoman dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko perlindungan anak. Panduan ini dibagi menjadi tiga bagian:

Bagian I dimulai dengan latar belakang hak-hak anak dan masalah perlindungan anak di industri kelapa sawit Indonesia, serta mendefinisikan konsep-konsep penting.

Bagian II memaparkan pendekatan 6 (enam) langkah untuk implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Wilmar dalam kegiatan sehari-hari.

Bagian III memberikan tinjauan mendalam tentang pekerja anak, bagaimana masalah ini dapat diatasi sesuai dengan praktik terbaik, dan pedoman pengembangan rencana remediasi pekerja anak.

DEFINISI

Anak: orang di bawah usia 18 tahun²

Hak Anak-anak: sekelompok hak asasi manusia dengan perhatian khusus pada perlindungan khusus dan kebutuhan anak di bawah umur³

Perlindungan anak: perlindungan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran.⁴

Pekerja Anak: pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi dan martabat anak-anak, dan membahayakan perkembangan fisik dan mental anak-anak⁵

Eksplorasi Seksual: eksploitasi seksual anak-anak didefinisikan sebagai pelecehan atau memanfaatkan anak untuk keuntungan pribadi, dengan melibatkan mereka dalam pekerjaan seks atau aktivitas seksual.⁶

² [UNICEF, The Convention on the Rights of the Child: The Children's Version](#)

³ [UNICEF, Child rights and why they matter](#)

⁴ [UNICEF, Child protection](#)

⁵ [ILO, What is child labour?](#)

⁶ [UNICEF webpage on Child Protection: Violence against children](#)

Bagian I: Kondisi Anak di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, dan dengan sekitar 89 juta orang di bawah usia 18 tahun, populasi anak di negara ini juga terbesar keempat⁷. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Terlepas dari kemajuan ini, sekitar 26 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 70 juta penduduk lainnya masih rentan jatuh ke dalam kemiskinan setiap tahunnya.

Data tentang anak tidak selalu dikumpulkan secara komprehensif, dan karena wilayah di Indonesia sangat luas dan beragam, tren nasional sering kali menutupi kesenjangan yang besar antar wilayah. Di tingkat nasional, sekitar 50 juta anak hidup dalam kemiskinan dan berisiko menjadi pekerja anak atau korban perdagangan manusia dan eksploitasi. Tingkat kemiskinan anak umumnya lebih tinggi di daerah pedesaan, di mana perkebunan kelapa sawit berada, dan juga terkait dengan jenis kelamin dan latar belakang pendidikan orang tua dan pengasuh mereka. Hampir 98% anak-anak yang berusia 7 hingga 12 tahun masuk sekolah dasar, meskipun anak-anak yang tinggal di keluarga yang termiskin empat kali lebih mungkin putus sekolah daripada anak-anak dari keluarga terkaya. Data dari tahun 2011 (data terakhir yang tersedia) memperkirakan 2,3 juta anak berusia 7-15 tahun tidak bersekolah.

Anak-Anak di Sektor Sawit Indonesia

Meskipun pekerja anak merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian utama dalam industri sawit Indonesia, anak-anak dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh industri sawit dengan cara-cara lain, baik secara positif maupun negatif. Industri ini berperan besar dalam mendukung mata pencaharian keluarga di daerah pedesaan Indonesia. UNICEF memperkirakan bahwa hingga 5 juta anak terdampak oleh industri sawit di Indonesia, di mana anak-anak tersebut adalah tanggungan pekerja, bagian dari masyarakat setempat, atau terkadang menjadi pekerja anak⁸.

Beberapa dampak paling serius pada anak-anak berasal dari kondisi kerja di bawah standar yang dialami orang tua dan pengasuhnya. Misalnya, upah yang rendah bagi orang tua yang bekerja dapat menimbulkan kebutuhan bagi anak-anak untuk bekerja untuk menambah pendapatan keluarga, yang meningkatkan risiko adanya pekerja anak dan mempengaruhi kesempatan pendidikan mereka. Jam kerja yang panjang dan kurangnya jasa pengasuhan anak yang terjangkau juga dapat membatasi kemampuan orang tua untuk mengawasi dan mengasuh anak-anak mereka selama jam kerja dan menempatkan anak-anak dalam risiko pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi. Lebih jauh lagi, terbatasnya perlindungan kehamilan dapat meningkatkan risiko bagi pekerja dan anak-anak mereka untuk terpapar bahan kimia beracun, yang dapat berdampak sangat buruk pada kesehatan anak.

⁷ [World Bank Country Profile: Indonesia \(2019\)](#)

⁸ [UNICEF, Palm Oil and Children in Indonesia: Exploring the Sector's Impact on Children's Rights \(2016\)](#)

Anak-anak dalam komunitas sawit rentan terhadap sejumlah risiko perlindungan anak, karena kemiskinan, terbatasnya akses ke layanan pemerintah, dan kondisi terasing secara sosial. Daerah pedesaan di Indonesia memiliki tingkat pendaftaran kelahiran yang rendah, yang dapat membatasi akses anak ke layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Mengingat risiko perlindungan anak yang saling terkait, perusahaan harus menghubungkan kebijakan dan praktik lain untuk mengatasi masalah terkait anak.

Misalnya, inisiatif dan kebijakan di tingkat perusahaan atau perkebunan, seperti program yang mencakup kepentingan dan hak perempuan, pendidikan dan kesehatan perlu menyadari dampaknya terhadap anak.

Piagam Wanita Wilmar⁹ dan Kerangka Hak Asasi Manusia Wilmar¹⁰ juga mencakup elemen khusus yang terkait dengan perlindungan anak.

Bacaan Lanjut

- [UNICEF Palm Oil and Children in Indonesia: Exploring the Sector's Impact on Children's Rights, 2017](#)
- [RSPO, Children's Rights in RSPO Member Palm Oil Plantations in Indonesia, 2019](#)

Kerangka Hukum Indonesia tentang Perlindungan Anak

Indonesia sudah menandatangani sejumlah perjanjian hak asasi manusia internasional, di mana pemerintah wajib membuat undang-undang dan kebijakan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Pemerintah meratifikasi CRC pada bulan September 1990 dan telah mengadopsi sejumlah instrumen lain termasuk CEDAW, Protokol Opsional tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, Protokol Opsional tentang penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia dan Pasifik yang meratifikasi seluruh konvensi utama ILO yang mencakup prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, termasuk Konvensi No. 138 dan No. 82 tentang pekerja anak.

Sejak meratifikasi perjanjian-perjanjian penting ini, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengadaptasi ketentuan perjanjian tersebut dalam undang-undang di tingkat nasional. Pada tahun 2016, UU Perlindungan Anak tahun 2002 diamandemen untuk memperkuat hukum yang melindungi anak-anak dari pelecehan seksual.

⁹ [Wilmar Women's Charter, 2019](#)

¹⁰ [Wilmar Human Rights Framework, 2019](#)

Pada tahun 2018, Indonesia membuat kemajuan dalam upaya menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, yang meningkatkan perlindungan anak dari perdagangan manusia.

Bacaan Lanjut

- [US Department of Labor, 2018 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Indonesia, 2019](#)

Risiko Perlindungan Anak untuk Anak-Anak di Industri Sawit Indonesia

Untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak dalam semua operasi, baik di dalam maupun di luar tempat kerja, di komunitas pekerja dan fasilitas yang disediakan perusahaan, prinsip-prinsip utama berikut ini perlu diadopsi:

- Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan eksploitasi, dengan kesadaran bahwa kepentingan anak harus dijaga dalam setiap pengambilan keputusan mengenai hak-hak mereka. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya untuk memperhatikan anak-anak dan akan bertindak jika ada anak atau remaja yang dirugikan atau berisiko dirugikan.
- Perusahaan memastikan bahwa operasinya, serta operasi pemasok dan kontraktornya, mematuhi dan menjalankan Kebijakan tersebut; semua pihak wajib berupaya menyelaraskan prosedur mereka dengan prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.
- Perusahaan mengakui adanya potensi risiko dan dampak baik dari kegiatan operasional perusahaan itu sendiri maupun dari pemasok dan kontraktornya terhadap hak-hak anak dan akan sebisa mungkin mengatasi atau mengurangi dampak-dampak tersebut.
- Perusahaan memastikan bahwa karyawan, pekerja, pemasok, dan kontraktor telah mendapatkan pelatihan yang baik mengenai Kebijakan sebagai salah satu bagian penting proses rekrutmen yang bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip di atas berlaku untuk masalah-masalah perlindungan anak yang tercakup dalam Kebijakan Perlindungan Anak Wilmar. Sejumlah masalah penting dibahas di bawah ini, termasuk mengenai pekerja anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual, kesejahteraan anak yang tinggal bersama orang tua yang bekerja, akses ke pendidikan, keselamatan di jalan, dan pencatatan kelahiran.



Pekerja Anak

Pekerja anak adalah salah satu masalah utama perlindungan anak di sektor kelapa sawit. Sesuai definisi di Konvensi Usia Minimum ILO (No. 138) dan Konvensi Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (No. 182), pekerja anak adalah pekerjaan yang berbahaya bagi perkembangan mental, fisik, sosial, atau moral anak.

Kebijakan Wilmar adalah untuk sama sekali tidak mentoleransi pekerja anak sebagaimana diatur dalam Klausul Larangan Pekerja Anak, yang berlaku untuk semua pekerja langsung dalam kegiatan operasi Wilmar, serta para pemasok dan kontraktornya. Untuk informasi lebih lanjut tentang pekerja anak dan pendekatan Wilmar untuk menangani pekerja anak, lihat Bagian III.

Kekerasan terhadap Anak-Anak

Kekerasan terhadap anak-anak di rumah, sekolah, dan masyarakat banyak terjadi di Indonesia. Meskipun di Indonesia telah mengalami penurunan dalam penindasan, perkelahian fisik, dan serangan fisik,¹¹ anak laki-laki khususnya berisiko mengalami serangan fisik di sekolah oleh guru dan teman sebayanya. Guru sering menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak-anak, dan belum banyak kesadaran mengenai bagaimana melaporkan insiden kekerasan semacam ini.

Di Indonesia, anak perempuan remaja lebih rentan daripada anak laki-laki terhadap praktik berbahaya seperti pernikahan di bawah umur. Menurut UNICEF, satu dari sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan anak perempuan dari keluarga miskin lebih cenderung menikah di bawah umur daripada anak perempuan dari keluarga yang kaya.¹²

¹¹ [UNESCO, Behind the numbers: Ending school violence and bullying, 2019](#)

¹² [UNICEF \(Indonesia\), Child Protection](#)

Eksplorasi Seksual

Eksplorasi seksual anak-anak didefinisikan sebagai melecehkan atau memanfaatkan anak untuk keuntungan pribadi, kepuasan atau keuntungan yang mengakibatkan perlakuan tidak manusiawi dan berbahaya terhadap anak (termasuk mengakses gambar-gambar seksual di internet)¹³. Eksplorasi dan pelecehan seksual juga dapat melibatkan pemaksaan, atau mempersiapkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual, baik anak itu sadar atau tidak dengan apa yang sedang terjadi. Ini mungkin termasuk kegiatan tanpa kontak fisik, seperti melibatkan orang yang rentan dalam untuk melihat atau membuat gambar seksual, menonton kegiatan seksual, mendorong anak-anak untuk berperilaku dengan cara yang tidak pantas secara seksual, atau mempersiapkan anak untuk pelecehan (termasuk melalui internet). Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak.

Eksplorasi seksual adalah kegiatan ilegal dan merupakan pelanggaran berat yang dapat menjadi dasar tindakan disipliner dan tuntutan hukum. Wilmar mengakui bahwa perlindungan anak-anak dari bahaya adalah tanggung jawab semua orang dan perusahaan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan, sebisa mungkin, keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di masyarakat tempat mereka tinggal. Ini berlaku untuk semua orang yang berhadapan langsung dengan anak-anak seperti pengasuh, guru/pendidik, pengemudi bus, pihak manajemen, dan setiap personel yang tinggal bersama anak-anak di komunitas perkebunan.

Wilmar dan para pemasoknya harus menanggapi semua bentuk eksploitasi anak dan pelecehan anak dengan cepat dan tepat ketika diketahui hal ini terjadi. Pemasok dan kontraktor harus mengembangkan pendekatan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual melalui pemeriksaan wajib terhadap semua karyawan dan penyediaan pelatihan tentang pencegahan eksploitasi dan pelecehan yang dikembangkan bersama pakar/organisasi hak anak. Selain itu, para pemasok harus bekerja sama dengan tim investigasi dan petugas penegak hukum ketika ada korban dan saksi anak yang terlibat.

¹³ [Save the Children Resource Centre](#)

MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL, KEKERASAN DAN PELANGGARAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Sejak 2019, Kelompok Kerja Wanita Wilmar telah mengorganisir program untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di perkebunan kami. Hingga saat ini, sekitar 1.461 perempuan dan anak perempuan telah memperoleh manfaat dari program ini.

Dengan fokus utama pada perempuan dan anak perempuan, program ini juga menekankan bahwa perempuan dan laki-laki dari semua lapisan masyarakat dapat menjadi korban pelecehan seksual, meskipun perempuan adalah korban utama.

Tujuan dari program ini adalah untuk:

- Meningkatkan kesadaran bahwa pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja (misalnya di rumah, online/internet, transportasi umum, ruang atau tempat publik, dll.)
- Meningkatkan kesadaran tentang berbagai bentuk pelecehan seksual, seperti Pelecehan Verbal, Gestural, Psikologis, Visual, Fisik, dan Online
- Meningkatkan kesadaran tentang eksploitasi seksual anak
- Meningkatkan kesadaran tentang apa yang dapat dilakukan jika mereka, atau orang yang mereka kenal, dilecehkan dan / atau dilecehkan secara seksual

Secara keseluruhan, program ini telah menciptakan ruang aman untuk dialog terbuka, untuk pekerja menyuarakan keprihatinan secara langsung dengan manajemen dan untuk mengidentifikasi solusi potensial untuk setiap masalah yang diangkat.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN?

- Lakukan proses pemeriksaan saat merekrut karyawan baru, terutama untuk posisi yang berhadapan langsung dengan anak-anak. Proses pemeriksaan tersebut bisa termasuk:
 - Meminta Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang dikeluarkan oleh kepolisian Indonesia untuk memastikan tidak adanya segala bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak, seperti eksploitasi seksual, kekerasan, dan pelecehan;
 - Memeriksa sejarah kerja, termasuk pemeriksaan referensi dan/atau proses disipliner yang dilakukan karena adanya malpraktik;
 - Meminta informasi terkait dari organisasi profesi untuk guru, penyedia jasa pengasuhan anak, praktisi kesehatan, dsb.;
 - Mengeluarkan kode perilaku etik/kebijakan perlindungan anak untuk calon karyawan dan meminta komitmen dan tanda tangan ketika mereka diterima bekerja.
- Pastikan kontraktor dan pemasok mematuhi prosedur serupa

- Jika masalah telah teridentifikasi, perusahaan harus:
 - Memprioritaskan korban dan libatkan ahli hak anak dan organisasi yang kompeten dalam menangani anak
 - Melaporkan kekhawatiran atau dugaan pelecehan/eksploitasi dan pelanggaran apa pun terhadap Kebijakan ini kepada Perwakilan Sumber Daya Manusia/personil yang ditunjuk, baik secara langsung atau melalui hotline/alamat email anonim. Mereka akan memutuskan langkah-langkah yang tepat untuk diambil, yang mungkin termasuk perujukan masalah tersebut kepada pihak berwenang setempat dan mendukung penuntutan pidana.
- Perkuat bantuan untuk korban dengan bekerja sama dengan penegak hukum.
- Hanya memberikan informasi sensitif terkait eksploitasi seksual dan pelecehan anak yang melibatkan karyawan kepada petugas penegak hukum serta manajemen internal senior yang relevan.

Kesejahteraan Anak-Anak yang tinggal bersama Orang Tua yang bekerja

Perusahaan perlu memastikan kesejahteraan anak-anak yang tinggal bersama orang tua mereka, serta keluarga yang menggunakan layanan yang dikelola pemasok (misalnya sekolah, tempat penitipan anak, klinik, dan sarana transportasi). Ini juga berlaku untuk anak-anak yang tinggal di perumahan pekerja dan fasilitas rekreasi.

Wilmar mengharapkan pemasok akan berupaya memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan di komunitas sawit serta memastikan bahwa sarana pengasuhan anak mudah diakses dan sesuai dengan pola kerja orang tua. Ini sangat penting untuk membangun komunitas yang tangguh di sekitar perkebunan, yang pada akhirnya akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih kuat dan perkebunan yang lebih produktif.

Mendorong kesetaraan gender juga menghasilkan "keuntungan ganda" dengan memberikan manfaat bagi perempuan dan anak-anak dan sangat penting bagi kesehatan dan perkembangan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Jika perempuan mampu mencapai kemandirian ekonomi dan dapat dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, ini juga akan berdampak positif pada kehidupan anak.

KUNJUNGAN KE PUSAT PENITIPAN ANAK DAN BAYI YANG MAPAN

Awalnya, pekerja penitipan anak Wilmar hanya diberikan pelatihan dasar. Dari umpan balik yang disampaikan oleh karyawan dan pihak eksternal, Wilmar dan Kelompok Kerja Wanita (WoW) melihat pentingnya mengutamakan kebutuhan belajar anak-anak dan persyaratan keselamatan terperinci, serta melengkapi pengasuh dengan pengetahuan yang tepat.

Pada tahun 2018, Wilmar mengadakan pelatihan mendalam tentang Kebijakan Perlindungan Anak (CPP) untuk pekerja penitipan anak dan pengasuh bayi dengan fokus utama pada keselamatan dan penanganan anak. Serangkaian pertemuan diadakan dengan WoW untuk menentukan dan memperkenalkan peran sub-komite khusus penitipan anak, yang memungkinkan pelaporan yang lebih mudah kepada manajemen tentang masalah terkait penitipan anak dan untuk memfasilitasi informasi rutin tentang masalah penitipan anak dan kesejahteraan anak.

Pada Agustus 2018, pekerja penitipan anak Wilmar yang terpilih mengunjungi dua pusat penitipan anak dan bayi yang sudah mapan di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik pengasuhan anak terbaik. Mereka juga belajar lebih banyak tentang rencana makan, serta pemeriksaan keamanan dan kesehatan. Setelah kunjungan mereka, pekerja penitipan anak memahami perlunya memperkenalkan kegiatan pendidikan berbasis bermain untuk anak-anak. Mereka juga telah mempelajari metode komunikasi yang efektif.

Tujuan dari kunjungan tersebut adalah:

- Untuk lebih memahami pentingnya, dan meningkatkan kemampuan mengelola, kebersihan penitipan anak dan keselamatan anak-anak
- Untuk mendapatkan pengetahuan, ide dan keterampilan dalam meningkatkan pengasuhan anak di penitipan anak

Sampai saat ini, WoW terus memantau crèche dan meningkatkan fasilitas melalui interaksi reguler dengan sub-komite penitipan anak, orang tua, dan dengan manajemen perkebunan.

Akses ke Pendidikan

Menurut Bank Dunia, sistem pendidikan Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia. Namun, kurangnya sekolah dan guru yang berkualitas di Indonesia merupakan tantangan besar bagi sistem pendidikan. Di daerah pedesaan, tingkat pendaftaran sekolah dasar lebih rendah, sementara daerah yang lebih makmur telah berhasil mewujudkan pendidikan dasar bagi semua anak.¹⁴

Menghormati hak atas pendidikan, Wilmar mengharapkan pemasok dan kontraktor memberi peluang terbaik untuk mengakses sekolah dasar dan menengah kepada semua anak-anak stafnya. Akses ke pendidikan sangat penting untuk memastikan dan memungkinkan hak-hak lain, seperti kesehatan dan standar hidup yang memadai. Meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk menyediakan sekolah, Wilmar melihat bahwa pendidikan dapat mendorong potensi anak dan juga menjadi faktor kuat untuk mencegah adanya pekerja anak.

Tersedianya peluang pendidikan mengisi kesenjangan layanan penting di daerah operasional yang terpencil dan di mana lokasi sekolah jauh dari masyarakat. Transportasi ke sekolah sering disediakan perusahaan dalam situasi seperti ini. Sering kali, orang tua tidak melihat nilai pendidikan dan hal ini bisa menjadi penghalang besar bagi anak untuk dapat menikmati hak atas pendidikan.

Untuk sekolah yang dioperasikan atau didanai oleh perusahaan, praktik perekrutan yang bertanggung jawab akan diterapkan (misalnya pemeriksaan latar belakang/SKCK dari kepolisian) untuk memastikan keamanan dan kecocokan karyawan baru sebelum mereka diperbolehkan bekerja langsung dengan anak-anak.



© Wilmar International

¹⁴ Education in Indonesia, Briefing, World Bank (2014)

MENGAMANKAN AKSES PENDIDIKAN SELAMA PANDEMIK COVID-19

Sekolah-sekolah di seluruh dunia telah ditutup, dan banyak pelajaran dialihkan secara online, karena kondisi terkait pandemi. Penutupan sekolah menimbulkan dampak pada lebih dari 9.000 anak usia sekolah yang tinggal di perkebunan kami di Indonesia, Ghana, Malaysia, dan Nigeria, di mana konektivitas online dapat menjadi tantangan bahkan di saat terbaik.

Untuk membantu mempertahankan pendidikan di perkebunan-perkebunan Wilmar, perusahaan mengadopsi pedoman berikut selama penutupan sekolah pada periode pandemi Covid-19:

- Sekolah akan tetap tutup dan tidak ada kegiatan belajar di ruang kelas hingga peraturan atau perintah diterima dari pemerintah
- Kami bekerja dengan sekolah dan guru dalam mengembangkan SOP baru untuk melanjutkan pelajaran sekolah. Wilmar akan membantu menyediakan disinfektan, pembersih tangan, dan APD
- Kami membantu guru untuk memfasilitasi akses ke pekerjaan rumah, lembar kerja, dan bahan bacaan dengan mencetaknya di kantor kami atau menyediakan buku aktivitas
- Materi pembelajaran didistribusikan kepada anak-anak di perkebunan kami melalui kerja sama dengan para guru, anggota komite perempuan / kelompok kerja perempuan, dan staf perkebunan kami
- Kami memelihara komunikasi terbuka dengan guru untuk membantu memantau situasi dan memberikan bantuan di mana mungkin, seperti dengan pemeriksaan dan evaluasi pekerjaan rumah, serta menyediakan persediaan dan bantuan lain yang diperlukan
- Di mana program online atau televisi / radio tersedia, kami akan bekerja dengan guru untuk membantu memastikan penggunaan yang maksimal.

Untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses terus oleh anak-anak yang tinggal di perkebunan kami selama periode penutupan sekolah dalam pandemi Covid-19 ini, koordinasi antara guru dan manajemen penting. Kami mengatur pertemuan rutin dengan para guru untuk mengetahui jenis materi apa yang cocok dapat diberikan untuk anak-anak, dan cara terbaik untuk memantau kemajuan anak-anak.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN PERUSAHAAN?

- Bekerja sama orang tua untuk memahami halangan-halangan yang mungkin dihadapi anak-anak mereka, termasuk kemiskinan, biaya-biaya yang tersembunyi seperti iuran sekolah, buku, dan seragam yang mungkin tidak terjangkau bagi keluarga tersebut, serta pilihan transportasi dan biaya untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah.
- Bantu orang tua menghargai nilai pendidikan dengan menghubungkan mereka dengan berbagai kesempatan yang ada, termasuk beasiswa atau program bantuan sosial seperti pengasuhan anak, sistem transportasi bersama teman, kegiatan ekstra-kurikuler, dan hobi.
- Bantu anak-anak pekerja untuk mengakses pendidikan menengah, yaitu dengan menyediakan transportasi, sehingga mengurangi kemungkinan anak-anak untuk bekerja di usia muda.
- Lakukan praktik perekrutan yang bertanggung jawab saat merekrut guru/pekerja lainnya untuk memastikan keselamatan anak-anak.
- Bekerja dengan pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil.
- Bekerja sama dengan LSM lokal dan/atau universitas setempat untuk meningkatkan pelatihan guru dan kualitas pendidikan.
- Sediakan transportasi untuk anak-anak pekerja di sekolah dasar dan sekolah menengah.
- Berikan beasiswa kepada anak-anak di komunitas sawit. Walaupun iuran sekolah telah digratiskan, orang tua dapat menggunakan dana beasiswa tersebut untuk kebutuhan lain seperti seragam dan buku.

Keselamatan di Jalan

Perlindungan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak mencakup anak-anak yang tinggal di komunitas di luar wilayah operasi perusahaan. Di mana ada kendaraan-kendaraan besar yang bergerak antara lokasi-lokasi kerja, keselamatan anak-anak harus diperhatikan dengan serius untuk mencegah terjadinya cedera atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi risiko tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan adanya pergerakan kendaraan di lokasi perkebunan untuk meningkatkan keselamatan dan perlindungan anak-anak dari potensi cedera akibat lalu lintas. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dapat memperkuat kesadaran keselamatan anak-anak dan remaja di jalan dengan meningkatkan kesadaran mengenai peraturan keselamatan dan lalu lintas yang sederhana untuk anak-anak.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN?

- Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil terkait untuk memberikan pelatihan tentang keselamatan lalu lintas kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran.
- Ambil langkah-langkah pengamanan seperti penggunaan rambu lalu lintas yang jelas dan memadai
- Berikan pelatihan kepada pengemudi dan operator kendaraan besar untuk mematuhi peraturan keselamatan lalu lintas.
- Menerapkan aturan yang melarang anak-anak dan remaja yang tidak memiliki izin untuk mengemudi di lokasi perusahaan.
- Memberikan sosialisasi kepada anak-anak terkait perlindungan diri untuk keselamatan di jalan

KESELAMATAN ANAK DAN PENCEGAHAN KECELAKAAN

Sejak 2018, Wilmar telah melakukan penilaian keamanan anak tahunan. Fokus kami pada keselamatan anak dan pencegahan kecelakaan yang melibatkan anak-anak di perkebunan kami telah terbukti efektif, dengan adanya pengurangan jumlah insiden dari 2018 hingga 2019. Langkah-langkah yang berkontribusi untuk hal ini adalah:

1. Menciptakan Lingkungan yang lebih Aman untuk Anak-Anak

Insiden terkait jalan raya adalah ancaman terbesar bagi anak-anak di perkebunan kami. Wilmar telah menerapkan langkah-langkah keamanan untuk memitigasi kendaraan yang mengangkut alat berat, termasuk gerbang, polisi tidur/speed bumps dan jalur pejalan kaki di sekitar area pemukiman, creche, dan sekolah. Truk dan alat berat harus ditempatkan di area parkir yang ditentukan jauh dari penghuni dan anak-anak. Untuk risiko lainnya, kami juga telah mengisi kolam terbuka yang tidak digunakan dan memasang tanda peringatan di sekitar perairan terbuka.

2. Mendidik Pengasuh dan Anak

Wilmar memberikan pelatihan kepada sekolah, orang tua, dan anak-anak tentang keselamatan di sekitar perkebunan — terutama terkait dengan penanganan makanan, kebakaran, bencana alam, dan kabut asap. Selain itu, kami mendidik siswa di sekolah milik Wilmar tentang masalah pelecehan seksual.

3. Melindungi Kesehatan Anak dan Keluarga

Wilmar menerapkan program imunisasi untuk anak-anak di Perkebunan Sabahmas kami dan semua perkebunan di Indonesia, dan pengobatan pencegahan cacing ditawarkan kepada anak-anak di perkebunan Kiabau kami. Kami juga memberikan masker wajah kepada keluarga seluruh karyawan sebagai langkah perlindungan dari polusi kabut asap di Indonesia.

Pencatatan Kelahiran

Tingkat pencatatan kelahiran yang rendah, khususnya di daerah terpencil di mana akses terhadap layanan tersebut terkadang sulit, merupakan tantangan di Indonesia. Diperkirakan hanya 58% anak-anak di Indonesia berusia di bawah 5 tahun di daerah pedesaan yang terdaftar, dibandingkan dengan 76% di daerah perkotaan.¹⁵ Tidak terdaftarnya kelahiran menghalangi anak dari mengakses layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, yang meningkatkan risiko anak tersebut dipaksa menjadi pekerja anak dan diperdagangkan atau menjadi korban eksploitasi dan pelecehan lainnya.

Perusahaan dapat berperan penting dalam mendukung pencatatan kelahiran dengan memberikan bantuan logistik, termasuk menyediakan sarana transportasi ke pusat registrasi kelahiran, memberikan cuti berbayar untuk mendaftarkan kelahiran, dan memberikan bantuan bagi pekerja untuk memahami persyaratan pencatatan kelahiran.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN?

- Sediakan transportasi ke pusat pencatatan kelahiran dan tawarkan bantuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pendaftaran.
- Berikan cuti berbayar untuk mendaftarkan kelahiran.
- Berikan bantuan kepada pekerja yang mengalami kesulitan memahami persyaratan registrasi kelahiran.
- Bekerja dengan pemerintah setempat untuk mendorong upaya pendaftaran di komunitas pekerja.



© Wilmar International

¹⁵ Palm Oil and Children in Indonesia: Exploring the Sector's Impact on Children's Rights, UNICEF Indonesia (2016)

Keamanan Rumah Tangga di Komunitas Perkebunan

Rumah tangga di komunitas perkebunan terkadang tidak aman untuk anak-anak, terutama jika mereka tidak terlindungi dari kontak dengan peralatan kerja (seperti alat panen yang disimpan di atau dekat rumah). Bahaya keselamatan dapat mencakup paparan laten bahan kimia pada alat pelindung diri (APD) yang mungkin dibawa pulang, atau kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan tajam atau berat yang ditinggalkan di sekitar atau di dekat rumah / area bermain, serta penyebaran penyakit dan infeksi dari orang tua yang sakit untuk seorang anak. Selain itu, pekerja perkebunan mungkin tidak menyadari pentingnya sanitasi, kebersihan, dan nutrisi bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN?

- Jika area penyimpanan khusus tidak disediakan bagi pekerja untuk menyimpan peralatan mereka, berikan pelatihan tentang cara merawat dan menyimpan peralatan kerja dengan aman di rumah, termasuk memastikan bahwa APD dan peralatan kerja dibersihkan dengan benar dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Memberikan pelatihan kesehatan dasar dan pertolongan pertama kepada orang tua, termasuk informasi tentang cara menghindari penyebaran penyakit melalui cuci tangan, menghindari kontak fisik saat menular, dan kapan harus mencari nasihat medis. Pelatihan juga harus mencakup panduan tentang bagaimana melindungi Kesehatan anak-anak selama kebakaran hutan dan kabut asap (misalnya yang disebabkan oleh tebang-dan-bakar) dengan masker wajah.
- Memberi pekerja pelatihan dasar tentang prinsip-prinsip nutrisi yang baik, termasuk persiapan makanan yang higienis dan persyaratan diet seimbang yang mencakup buah dan sayuran segar serta makanan olahan / kemasan yang terbatas.
- Sertakan perumahan sebagai bagian dari bangunan yang dinilai dan diaudit untuk bahaya dan pastikan desain dan pemeliharaan perumahan mengakomodasi masalah keselamatan kebakaran.

Bagian II: Membuat Kebijakan dan Prosedur untuk Melindungi Anak

Perlindungan anak adalah tanggung jawab semua orang. Wilmar mewajibkan kegiatan operasional bisnis, pemasok, dan kontraktornya untuk menangani risiko bagi keselamatan anak, baik potensial maupun aktual, dan memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak mereka. Ini tidak hanya berlaku bagi kegiatan perusahaan dalam jam kerja, tetapi juga untuk setiap fasilitas yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan.

Semua pemasok dan kontraktor Wilmar diharuskan mematuhi kebijakan perlindungan anak Wilmar dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur mereka sendiri untuk melindungi anak-anak. Bagian berikut ini didasarkan pada Panduan Perlindungan Anak UNICEF untuk Bisnis (2018) yang menguraikan 6 (enam) langkah praktis yang harus diambil bisnis untuk melindungi dan melindungi anak-anak dalam operasi dan rantai pasokan mereka.



© Wilmar International

1. Melakukan Penilaian Risiko Perlindungan Anak

Penilaian risiko penting untuk dilakukan untuk memahami bagaimana kegiatan bisnis, karyawan, atau perwakilan usaha menimbulkan risiko bagi anak-anak. Penilaian risiko dapat dilakukan sendiri, atau diintegrasikan dalam manajemen risiko atau proses penilaian dampak yang ada. Penilaian tersebut merupakan langkah pertama yang penting dalam menentukan tingkat risiko yang ada dalam keterlibatan karyawan perusahaan, pemasok, dan kontraktor dengan anak-anak. Dalam kegiatan operasional Wilmar sendiri, penilaian dan tinjauan risiko khusus terhadap anak dilakukan setiap tahun. Perusahaan tidak diwajibkan melakukan penilaian risiko setiap tahun, selama ada cara yang jelas untuk meninjau risiko dan bagaimana mengurangi risiko tersebut.

CARA MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO PERLINDUNGAN ANAK

i. Identifikasi dan petakan semua peluang kontak langsung maupun tidak langsung dengan anak-anak

Contoh kontak langsung dan risikonya termasuk:

- Berinteraksi dengan anak-anak yang tinggal di dalam atau di sekitar komunitas perkebunan, baik di luar jam kerja atau sebagai bagian dari pekerjaan rutin (misalnya sopir bus sekolah yang dipekerjakan perusahaan)
- Menyediakan perawatan untuk anak, sebagai bagian dari pekerjaan rutin atau peran khusus pengasuhan anak (misalnya pekerja ditempat penitipan anak yang dipekerjakan perusahaan)

Contoh kontak tidak langsung dan risikonya termasuk:

- Berkomunikasi dengan anak-anak melalui platform online (misalnya seorang karyawan mengirim pesan kepada seorang anak melalui media sosial)
- Memiliki akses ke data atau gambar / video anak-anak (misalnya perusahaan memiliki informasi pribadi tentang anak-anak pekerja dan membagikannya dengan pihak ketiga tanpa persetujuan mereka)

ii. Untuk setiap peluang kontak langsung dan tidak langsung yang diidentifikasi di atas, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini

- Apa jenis kegiatan dan di mana kontak terjadi?
- Siapa yang terlibat dalam kegiatan ini?
- Seberapa sering kontak dengan anak-anak dan/atau remaja ini terjadi?
- Apakah kontak dengan anak-anak dan/atau remaja ini mengharuskan atau memberikan ruang bagi karyawan atau perwakilan perusahaan untuk berada sendirian dengan anak-anak? Jika ya, bagaimana caranya?
- Apa saja potensi risiko terhadap anak-anak dan/atau remaja karena kontak tersebut?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perusahaan akan dapat mengidentifikasi di mana ada keterlibatan antara anak-anak dan karyawannya.

iii. Libatkan ahli perlindungan anak dari luar perusahaan untuk melakukan penilaian

Bekerja dengan pihak profesional dan ahli perlindungan anak yang berkualifikasi dapat membantu perusahaan meningkatkan kesadaran mereka tentang semua cara di mana tindakan dan fasilitas mereka berdampak pada anak-anak. Hal ini dilakukan dengan membangun gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana perusahaan menyebabkan dan berkontribusi terhadap risiko. Para ahli yang berkualifikasi juga dapat memastikan partisipasi yang aman dan bermakna dari anak-anak dalam penilaian resiko tersebut.

Dengan pemikiran ini, organisasi masyarakat sipil dapat memandu perusahaan dalam membuat kebijakan dan standar yang melindungi anak-anak yang bekerja dan yang lainnya di dalam dan di sekitar fasilitas mereka; mengangkat dan memantau masalah keselamatan dan perlindungan yang diungkapkan anak-anak dan anggota masyarakat; membantu perusahaan menegakkan hukum dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi; dan memberikan keahlian advokasi dan pelatihan untuk membantu baik perusahaan maupun anak-anak mendorong dilindunginya hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

2. Melakukan Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Praktik saat ini

Analisis kesenjangan untuk memetakan kebijakan dan proses internal yang ada saat ini dapat membantu perusahaan memahami sejauh mana perlindungan anak telah diintegrasikan ke dalam proses-proses penilaian dan manajemen risiko.

BAGAIMANA MELAKUKAN ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

i. Meninjau peraturan dan perundangan yang berlaku

Tinjauan ini harus mencakup tolok ukur perundangan terkait perlindungan dan pelanggaran hak anak dan bagaimana kebijakan dan praktik-praktik perusahaan saat ini memenuhi kerangka hukum di Indonesia

ii. Memahami persyaratan hukum untuk perlindungan anak di Indonesia dan menilai praktik-praktik manajemen yang melampaui kepatuhan hukum

Kegiatan ini perlu mencakup tinjauan tentang:

- Seluruh kebijakan dan praktik yang ada di perusahaan untuk menentukan di mana pertimbangan terkait perlindungan anak sudah disebutkan atau di mana pertimbangan tersebut dapat dan perlu ditambahkan;
- Semua panduan untuk posisi berisiko tinggi (misalnya karyawan yang melakukan kontak langsung dengan anak-anak);
- Kebijakan dan kode etik yang berlaku untuk semua hubungan bisnis dan bagaimana hal ini disampaikan kepada karyawan dan pemasok.

Daftar Periksa Analisis Kesenjangan

- Apakah ada struktur tata kelola untuk menangani dan mengelola perlindungan anak dalam perusahaan?
- Apakah perlindungan anak tercakup dalam kebijakan yang berdiri sendiri atau diintegrasikan dalam kode perilaku etik perusahaan lainnya?
- Apakah ada kebijakan tentang rekrutmen yang bertanggung jawab, di mana dilakukan pemeriksaan kelayakan/latar belakang terhadap calon karyawan/rekanan?
- Apakah perusahaan sediakan pelatihan karyawan dan pemasok tentang perlindungan anak, terutama mereka yang melakukan kontak langsung dan tidak langsung dengan anak-anak?
- Apakah ada saluran untuk menerima pengaduan/menyampaikan kekhawatiran adanya tentang potensi eksploitasi atau pelanggaran hak anak?
- Apakah ada orang yang ditunjuk yang sudah terlatih dan mampu menangani masalah perlindungan anak?

3. Kembangkan komitmen kebijakan

Komitmen kebijakan adalah pernyataan yang memaparkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak, termasuk hak anak, sebagaimana dijelaskan dalam Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia dari PBB. Kebijakan perlindungan anak harus disetujui di tingkat manajemen yang paling atas, berdasarkan informasi dari pakar yang relevan, dan tertanam di semua departemen dan bidang operasional. Komitmen ini akan mengklarifikasi apa yang diharapkan perusahaan dari karyawan, pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan kegiatan operasionalnya. Kebijakan ini harus dapat diakses publik dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal, dan idealnya tersedia untuk umum.

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

- Pernyataan komitmen: Jelaskan mengapa perlindungan anak penting bagi perusahaan dan bagaimana perusahaan akan memenuhi tanggung jawabnya.
- Identifikasi risiko: Jelaskan risiko-risiko terkait perlindungan anak dan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan anak-anak. Ini tidak harus disebutkan dalam kebijakan, tetapi merupakan langkah yang membantu dalam mengembangkan kebijakan yang membahas masalah utama
- Definisikan istilah dan konsep utama: Berikan daftar istilah yang selaras dengan kerangka perundangan (misalnya definisi dan rentang usia pekerja anak).
- Lingkup komitmen: Tetapkan untuk siapa kebijakan ini berlaku, misalnya untuk karyawan, pemasok, dan orang yang secara rutin atau tidak langsung berinteraksi dengan anak-anak.

- Pernyataan tugas untuk merawat: Jelaskan tugas untuk merawat dan kewajiban hukum yang akan dipatuhi perusahaan Anda untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelanggaran hak mereka, seperti pekerja anak. Sertakan di sini rincian tentang bagaimana kebijakan itu akan ditegakkan dan konsekuensi pelanggaran (misalnya denda, hukuman, pemutusan/penangguhan kontrak dengan pemasok).
- Struktur tata kelola: Berikan rincian tentang siapa dan/atau bagian mana perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama untuk penerapan kebijakan tersebut, termasuk pejabat senior yang akan mengawasi. Ini tidak harus langsung ditangkap dalam kebijakan tetapi setidaknya harus didefinisikan dalam prosedur atau dokumentasi operasional internal.
- Struktur pelaporan: Jelaskan proses bagi para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk menyampaikan keprihatinan tentang keselamatan dan keamanan anak-anak.
- Persetujuan badan eksekutif: Berikan jaminan bahwa kebijakan tersebut telah disetujui dan disahkan oleh pejabat paling senior di perusahaan, misalnya Presiden Direktur atau Ketua Dewan.

Sebagai contoh kebijakan perlindungan anak, lihat [Kebijakan Perlindungan Anak Wilmar](#).

4. Kembangkan Rencana Implementasi

Rencana implementasi berisi rincian mengenai cara membuat Kebijakan Perlindungan Anak operasional. Rencana ini harus didorong baik dari atas maupun dari bawah: para pemimpin perusahaan harus mendukung kebijakan ini dan semua staf harus sadar dan turut mengupayakan keberhasilan kebijakan ini. Rencana implementasi juga harus menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut akan tertanam dalam perusahaan melalui sistem dan proses manajemen yang ada seperti perekrutan tenaga kerja.

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

i. Membangun Struktur Tata Kelola untuk Perlindungan Anak

Struktur tata kelola harus mencakup pengalokasian sumber daya staf khusus dalam organisasi yang bertanggung jawab akan perlindungan anak dan memiliki tingkat pengetahuan yang sesuai. Perlindungan anak juga harus ditambahkan ke mandat kepala bagian risiko atau dewan risiko, jika tepat.

Suatu jaringan perwakilan perlindungan anak perlu dibentuk sehingga ada paling tidak satu perwakilan di setiap lokasi daerah operasional perusahaan; mereka dapat melapor langsung ke penanggung jawab perlindungan anak di kantor pusat dan memastikan isu perlindungan anak diketahui oleh seluruh organisasi. Tanggung jawab ini bisa merupakan tambahan di luar pekerjaan sehari-hari mereka (misalnya pekerja creche).

ii. Membangun kemitraan eksternal dengan para ahli perlindungan anak setempat untuk meningkatkan kejelasan dalam isu-isu perlindungan anak

Kemitraan ini dapat membantu perusahaan menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks yang mungkin timbul dan menjadi rujukan untuk anak-anak yang telah terdampak.

iii. Tanamkan kebijakan tersebut dalam sistem manajemen perusahaan yang ada

Divisi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Komitmen perusahaan terhadap perlindungan anak harus dikomunikasikan kepada semua staf dan calon karyawan melalui saluran-saluran berikut ini:

- Pelatihan berkelanjutan: Anggota staf yang memiliki akses ke anak-anak harus diberikan pelatihan khusus tentang perlindungan anak, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini harus mencakup sesi penyegaran reguler sesuai kebutuhan dan pelatihan khusus, jika relevan.
- Iklan lowongan pekerjaan: Sertakan tautan ke kebijakan perlindungan anak perusahaan dalam iklan tersebut.
- Formulir aplikasi dan pernyataan diri: Mengharuskan pelamar yang akan melakukan kontak langsung dengan anak-anak untuk mengungkapkan hukuman yang pernah dijalani terkait dengan penangkapan atau penuntutan pidana.
- Wawancara: Uji pengetahuan dan komitmen pelamar terhadap perlindungan anak dalam pertanyaan wawancara.
- Referensi dan pemeriksaan latar belakang: Gunakan kesempatan ini untuk memastikan bahwa pelamar tidak memiliki catatan kriminal.
- Induksi: Latih semua staf baru mengenai kebijakan perlindungan anak.
- Pemantauan dan penilaian: Pertimbangkan untuk memasukkan indikator kinerja yang terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam penilaian kinerja individual.

Kebijakan dan prosedur yang mendukung kebijakan perlindungan anak ini juga setidaknya harus mencakup hal-hal berikut: area yang berbahaya/terlarang harus ditandai dengan jelas; fasilitas perusahaan tidak boleh digunakan untuk menyalahgunakan, mengeksploitasi, atau membahayakan anak-anak; staf harus selalu waspada tentang keberadaan anak-anak di dalam dan di sekitar lingkungan perusahaan. Perusahaan juga harus menjelaskan bahwa kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi tidak ditoleransi dalam kegiatan usaha.

iv. Melakukan peningkatan kesadaran internal dalam perusahaan

Semua staf harus dilatih tentang Kebijakan Perlindungan Anak, relevansi perlindungan anak dengan perusahaan, tanggung jawab mereka terhadap perlindungan anak, bagaimana mengidentifikasi risiko perlindungan anak, dan cara melaporkan masalah perlindungan anak dengan aman.

5. Tetapkan Struktur Pelaporan

Dalam perusahaan, perlu ada struktur pelaporan untuk menerima dan menanggapi laporan mengenai kesejahteraan anak. Proses ini dapat dibangun di atas kebijakan sumber daya manusia lain yang telah ada mengenai mekanisme pengaduan untuk menangani keluhan dari karyawan, pemasok, atau kontraktor. Meskipun dapat dibangun di atas struktur pelaporan yang ada, dapat dirancang suatu struktur mandiri untuk memproses klaim yang hanya terkait dengan isu-isu perlindungan anak. Karena itu, penting untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga eksternal termasuk petugas setempat yang berwenang serta para pakar atau LSM hak anak yang dapat menyarankan bagaimana menangani masalah-masalah ini dengan tepat, termasuk memberikan masukan dan rujukan.

Dalam semua tindakan yang berdampak pada anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip panduan. Ini berarti bahwa dalam setiap proses pengambilan keputusan, perlindungan anak, pelestarian kesejahteraan dan hak untuk hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisiknya diprioritaskan. Kerahasiaan, keadilan dan transparansi proses harus selalu dilaksanakan dan dijaga secara sesuai.

DAFTAR PERIKSA PELAPORAN PERLINDUNGAN ANAK

- Organisasi telah menetapkan prinsip-prinsip yang berlaku untuk laporan ini, termasuk jaminan tidak adanya balas dendam terhadap staf yang melaporkan; anonimitas; keamanan; kerahasiaan; dan keadilan.
- Organisasi menghormati hak privasi anak dan tidak mengungkapkan informasi atau data apa pun yang berkaitan dengan anak tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan sebelumnya
- Organisasi telah menugaskan seseorang untuk bertanggung jawab menerima dan menyelesaikan laporan-laporan ini.
- Organisasi memiliki prosedur penanganan laporan yang jelas dan transparan.

Bacaan Lanjut

- [UNICEF, Child Safeguarding Toolkit for Business, May 2018](#)
- [RSPO, Child Rights Guidance for Palm Oil Producers, December 2020](#)

6. Berikan Panduan bagi Karyawan tentang cara Mengambil Tindakan

Ada tindakan konkret yang harus diambil ketika timbul kekhawatiran tentang keselamatan dan kesejahteraan anak. Kekhawatiran tersebut dapat diatasi melalui kebijakan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) perusahaan atau struktur pelaporan lain, sehingga karyawan dan setiap pihak dapat melaporkan setiap kekhawatiran. Penting untuk dicatat bahwa penanggung jawab utama atas perlindungan anak di perusahaan tidak boleh menentukan apakah pelecehan atau pelanggaran telah terjadi atau tidak. Tanggung jawab mereka adalah melaporkan segala kemungkinan pelanggaran kepada badan/otoritas penegak hukum terkait.

DAFTAR PERIKSA TINDAKAN KARYAWAN

- Pastikan bahwa semua karyawan memahami peran dan tanggung jawab pimpinan utama perlindungan anak yang telah ditunjuk dan tahu bagaimana cara menghubungi orang tersebut dan perwakilan lain yang ada.
- Sediakan daftar rincian nomor kontak otoritas setempat, penegak hukum, seperti polisi, layanan sosial, dll.) dan LSM yang memiliki keahlian perlindungan anak.
- Komite perlindungan anak yang dibentuk harus mencakup orang-orang yang membantu staf utama perlindungan anak dan memberikan saran tentang apa yang sebaiknya dilakukan ketika ada kemungkinan insiden.
- Buat formulir insiden standar untuk mencatat setiap detail masalah yang diajukan dan suatu sistem untuk mengamankan kerahasiaan informasi ini.

Bacaan Lanjut

- [UNICEF, Child Safeguarding Toolkit for Business \(May 2018\)](#)

Bagian III: Implementasi Pedoman Tindakan Remediasi Pekerja Anak

Situasi Pekerja Anak di Industri Sawit Indonesia

Masalah pekerja anak sudah lama menjadi perhatian di industri kelapa sawit. Pekerja anak lebih umum ada di kalangan petani kecil dibandingkan dengan perkebunan besar. Namun demikian, di perkebunan kelapa sawit Indonesia, anak-anak sering dipekerjakan oleh keluarganya sebagai pembantu yang tidak dibayar (disebut pekerja kernet, seringkali tanpa sepengetahuan perusahaan).

Menurut UNICEF, statistik menunjukkan bahwa lebih dari 5% anak-anak berusia 6-17 tahun di Indonesia adalah pekerja anak. Lebih dari 60% dari anak-anak ini bekerja di industri pertanian seperti kelapa sawit. Sebagian besar anak-anak yang bekerja di kebun sawit memetik atau mengumpulkan buah sawit; mengangkut karung buah; dan mendorong gerobak buah ke lokasi pengumpulan.

Anak-anak yang bekerja di industri sawit menghadapi banyak bahaya bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Membawa beban berat dapat merusak tubuh anak yang sedang dalam pertumbuhan; menggunakan alat-alat yang berbahaya seperti pisau tajam untuk memanen kelapa sawit dapat melukai mereka secara permanen; paparan pestisida beracun dapat meracuni anak-anak dan menyebabkan masalah kesehatan yang berlangsung seumur hidup; dan aktivitas fisik yang berlebihan dapat membuat anak-anak terlalu lelah untuk belajar dan bersekolah.

Pekerja anak paling sering terjadi karena kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan. Sering anak-anak tersebut bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Upah rendah bagi orang tua yang bekerja di industri ini dan kuota panen yang berat juga memotivasi orang tua untuk mempekerjakan anak-anak mereka sebagai kernet. Selain itu, kurangnya akses ke kesempatan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil, membuat anak-anak putus sekolah pada usia dini untuk bekerja di industri sawit.

Apa yang dimaksud dengan Pekerja Anak?

Istilah 'pekerja anak' sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang merampas anak-anak dari masa kecil, potensi, dan martabat mereka, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental. Ini merujuk pada pekerjaan yang:

- berbahaya secara mental, fisik, sosial, atau moral bagi anak-anak; dan
- mengganggu kegiatan sekolah mereka dengan merampas kesempatan bersekolah; membuat mereka meninggalkan sekolah sebelum waktunya; atau mengharuskan mereka mencoba menggabungkan kehadiran di sekolah dengan pekerjaan yang terlalu panjang dan berat.

Semua pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak terhitung sebagai menjadikan mereka pekerja anak. Namun demikian, tidak semua pekerjaan berbahaya bagi anak. Tugas sesuai usia yang tidak mengganggu sekolah dan waktu luang dapat menjadi bagian positif dari proses pendewasaan anak. Sejak usia muda, banyak anak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menjalankan tugas, atau membantu orang tua mereka di pertanian atau bisnis keluarga, dan dengan demikian mendapatkan keterampilan yang akan mereka butuhkan sebagai pekerja dan anggota masyarakat di masa depan.

Apakah suatu pekerjaan dapat digolongkan menjadikan anak-anak sebagai 'pekerja anak' bergantung pada usia, jam kerja, dan kondisi kerja. Istilah-istilah berikut ini penting untuk dipahami ketika pekerja anak menjadi pekerja anak.

Klausula 'Tanpa Pekerja Anak' Wilmar

Wilmar mengakui usia minimum untuk bekerja penuh adalah 18 tahun. Memperhatikan Konvensi Usia Minimum ILO, 1973 (No. 138) yang menetapkan usia 15 tahun sebagai usia minimum untuk bekerja, di mana peraturan lokal mengizinkan mempekerjakan orang muda yang berusia antara 15 hingga 17 tahun.

Setiap orang yang berada dalam usia kerja legal tetapi di bawah 18 tahun dianggap sebagai 'pekerja muda' dan dapat berpartisipasi dalam pekerjaan tidak berbahaya, di bawah pengawasan orang dewasa, yang tidak berdampak negatif pada kesehatan, keselamatan, perkembangan pribadi anak, pendidikan, dan hak untuk bermain.

Wilmar hanya akan mengizinkan 'pekerja muda' di mana usia sekolah minimum setempat di bawah 15 tahun, dan di mana ada peraturan daerah yang mewajibkan pertimbangan dan kendali khusus untuk perlindungan yang tepat bagi pekerja muda, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada, jam kerja terbatas, tidak bekerja di malam hari, tidak ada pekerjaan yang berat dan aman. Pengembangan pedoman khusus yang disesuaikan konteks lokal diperlukan untuk alokasi ini. Bagaimanapun, Wilmar akan mematuhi pengamananan dalam Konvensi ILO 182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ini sesuai dengan regulasi di negara-negara seperti Indonesia.

PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA TENTANG PEKERJA ANAK

Indonesia memiliki hukum dan kebijakan yang kuat tentang pekerja anak. Pemerintah telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional utama tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO No. 138. tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Di bawah UU Ketenagakerjaan, 18 adalah usia minimum untuk pekerjaan penuh waktu. Anak-anak berusia 13-15 tahun hanya dapat melakukan pekerjaan ringan yang tidak berbahaya dan tidak mengganggu pendidikan mereka. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 235/2003 juga melarang pekerjaan dan aktivitas berbahaya bagi anak di bawah 18 tahun, termasuk pekerjaan yang memiliki bahaya fisik, bahaya kimia, atau yang secara alami berbahaya.

Kebijakan dan Prosedur untuk Mencegah adanya Pekerja Anak

Cara terbaik untuk mengatasi pekerja anak adalah dengan mencegahnya. Sebagai titik awal, perusahaan perlu memastikan bahwa anak-anak tidak bekerja di fasilitas atau kegiatan operasional mereka. Bagian ini memberikan panduan untuk pemasok dan kontraktor tentang cara mengidentifikasi risiko pekerja anak dan bagaimana mencegahnya.

1. Tetapkan kebijakan dan prosedur perekrutan: Terapkan kebijakan usia minimum bagi pekerja untuk memastikan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah usia minimum atau dalam kondisi pekerja anak.

Kebijakan tersebut dapat berupa komitmen yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam kebijakan yang ada yang mengatur perekrutan dan manajemen sumber daya manusia. Untuk memastikan kepatuhan, karyawan harus ditawari pelatihan tentang kebijakan dan bertanggung jawab atas implementasinya.

2. Verifikasi usia karyawan: Prosedur verifikasi usia penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan anak-anak secara tidak sengaja. Tanpa bukti usia, perusahaan tidak dapat memutuskan apakah pekerjaan cocok untuk karyawan yang bersangkutan. Terkadang remaja dapat memberikan kartu identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan, jadi langkah ini sangat penting untuk mencegah pekerja anak.

Prosedur verifikasi usia dapat mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:

- Meninjau catatan personel untuk mengidentifikasi apakah ada pekerja anak;
- Mengembangkan dan menyampaikan kebijakan perusahaan yang melarang adanya pekerja anak;
- Memasukkan persyaratan bahwa semua karyawan harus menunjukkan bukti kartu tanda pengenalan (E-KTP dan Kartu Keluarga) dalam perekrutan; dan
- Menetapkan prosedur penyimpanan catatan sumber daya manusia.

Teknik-teknik yang dapat diandalkan untuk memverifikasi usia pekerja meliputi:

- Memeriksa bentuk identifikasi yang dapat diandalkan, idealnya kartu identitas berfoto seperti Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran atau paspor
- Meminta salinan ijazah sekolah
- Menggunakan pertanyaan yang ditargetkan untuk mewawancarai pelamar di bawah usia minimum. Misalnya latar belakang pelamar seperti riwayat pendidikan, anggota keluarga dan sebagainya untuk menilai apakah pelamar jujur tentang usianya

3. Melakukan penilaian tempat kerja: Mengidentifikasi pekerjaan yang berbahaya di perusahaan – pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak – adalah langkah penting untuk mencegah adanya pekerja anak.

Lakukan penilaian di tempat kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan menentukan bentuk pekerjaan apa yang berbahaya dan harus dilarang bagi anak-anak. Ini dapat dicapai melalui pengamatan dan dengan berkonsultasi dengan staf, pekerja, perwakilan pekerja, pengawas ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Seperti disebutkan, meskipun pekerja muda di atas usia minimum untuk bekerja diizinkan untuk melakukan pekerjaan tidak berbahaya dalam kondisi yang ketat, mereka memiliki hak untuk dilindungi dari segala jenis pekerjaan atau pekerjaan yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral. Pemasok harus memastikan bahwa pekerja muda diperlakukan sesuai dengan hukum, termasuk tindakan untuk menghindari pekerjaan berbahaya dan penyediaan kondisi kerja yang layak.

PERNIKAHAN ANAK DAN PEKERJA ANAK

Pada tahun 2019, Indonesia menaikkan usia pernikahan resmi untuk anak perempuan dari 16 ke 19. Namun, di beberapa bagian Indonesia, pernikahan anak masih merupakan praktik yang umum.

Terkadang ada kesalahpahaman bahwa orang yang menikah di bawah usia 18 tahun harus diperlakukan sebagai orang dewasa dalam perekrutan dan perekrutan. Namun, hukum internasional dan nasional tidak membuat pengecualian untuk pekerja anak berdasarkan pernikahan.

Wilmar juga tidak mengakui pengecualian berdasarkan pernikahan. Pekerja muda berusia antara 15 hingga 18 tahun hanya dapat dipekerjakan di bawah kondisi yang ketat, sebagaimana diatur dalam klausul Tanpa Pekerja Anak dari Wilmar dan konsisten dengan pengamanaan ILO.

Pedoman Tindakan Perbaikan

Bagian ini menjabarkan prinsip dan prosedur operasional tentang bagaimana menangani kasus pekerja anak yang tidak dapat dicegah terjadi. Prosedur ini berlaku untuk semua kegiatan operasional Wilmar serta pemasok dan kontraktornya. Meskipun panduan ini tidak memaparkan menetapkan cara mengatasi akar penyebab adanya pekerja anak, pedoman ini berupaya memandu upaya perbaikan/ remediiasi berdasarkan kasus tertentu, sambil menangani tantangan-tantangan yang paling umum.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN RENCANA REMEDIASI PEKERJA ANAK

Rencana Remediasi Pekerja Anak adalah seperangkat prosedur operasional untuk memandu tanggapan perusahaan dalam menetapkan kepentingan terbaik jangka panjang bagi anak setelah kasus pekerja anak teridentifikasi. Organisasi yang memenuhi syarat atau penyedia layanan pihak ketiga dapat dilibatkan dalam pengembangan rencana remediasi. Anggaran yang diperlukan harus dialokasikan untuk memastikan rencana remediasi berjalan dengan lancar. Rencana remediasi harus dipersonalisasi dan mungkin selesai atau tidak selesai ketika anak mencapai usia kerja minimum.

Jika pekerja anak ditemukan, sangat penting untuk bertindak cepat untuk mencari solusi. Solusi ini harus mempertimbangkan keadaan khusus setiap anak atau kelompok anak, seperti usia, jenis kelamin, tingkat kedewasaan, kerentanan, ras atau etnis, konteks sosial dan budaya, di antara faktor-faktor lainnya.

Selain itu, jika ditemukan bahwa ada pekerja muda yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, rencana remediasi harus mencakup diskusi dengan orang tua atau wali anak tentang penugasan pekerja muda untuk melakukan pekerjaan tidak berbahaya di bawah pengawasan orang dewasa.

Wilmar berkomitmen untuk bekerja dengan para pemasoknya dalam situasi di mana ditemukan pekerja anak untuk mengembangkan dan menerapkan sistem untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan membangun sistem untuk mengurangi pekerja anak secara sistematis. Apabila diperlukan, Wilmar akan memberikan bantuan teknis untuk membantu pemasok yang melanggar untuk mengatasi masalah tertentu; dan memberikan bantuan teknis untuk masalah ketenagakerjaan yang lebih luas yang mendasari pekerja anak/pekerja paksa (misalnya kerja sama di tempat kerja, kesehatan dan keselamatan, kondisi kerja).

Untuk pelanggaran anak (yaitu pelecehan dan pelecehan), prosedur perlindungan anak harus diterapkan, termasuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang melalui jalur formal. Tindakan korektif harus dilaksanakan dan mengembangkan rencana tindakan remediasi, meliputi tindakan berikut:

Identifikasi Potensi Pekerja Anak

Jika ada pekerja yang diduga di bawah umur, sangat disarankan untuk tidak langsung mendekati mereka. Kartu identitas mereka harus diperiksa sebagai bagian dari proses pemeriksaan dokumen rutin dan semua keterangan dicek dengan mewawancarai orang-orang yang dekat dengan pekerja yang diduga di bawah umur tersebut.

Usia dan identitas anak harus diklarifikasi pada peninjauan dan verifikasi dokumen umur dan identitas. Perhatikan bahwa, jika anak-anak tidak memiliki dokumen identitas, akan lebih sulit memastikan usia mereka yang sebenarnya. Jika identitas dan usia anak tidak dapat ditentukan, tindakan berikut harus diambil:

- Berkomunikasi atau bertemu dengan orang tua atau wali jika mereka dapat ditemukan;
- Jika pemeriksaan kartu identitas tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, hubungi otoritas tenaga kerja setempat untuk memvalidasi identitas;
- Menilai usia melalui dokumen lain, seperti ijazah sekolah.

Mengidentifikasi usia anak penting karena ini akan menentukan pendekatan yang paling tepat dalam rencana remediasi.

Segera Pastikan bahwa Anak Berhenti melakukan Pekerjaan

Anak-anak harus segera berhenti melakukan pekerjaan dan ditempatkan di lingkungan yang aman. Alasan penghentian pekerjaan harus dijelaskan dengan baik kepada anak-anak di hadapan para ahli yang terlatih atau individu/organisasi yang memiliki kualifikasi dengan pengalaman bekerja untuk kesejahteraan anak. Persyaratan hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak Wilmor harus dijelaskan kepada anak tersebut, selain bahwa mereka akan bisa dipekerjakan setelah mencapai usia minimum yang sesuai.

Tindakan yang harus Dihindari

Sangat penting bahwa perusahaan tidak:

- Mengeluarkan pekerja yang dicurigai atau telah dikonfirmasi menjadi pekerja anak;
- Mengancam anak-anak atau keluarga mereka atau menghambat kemajuan investigasi dan remediasi;
- Menyembunyikan atau memalsukan informasi dan dokumentasi apa pun.

Meskipun anak-anak harus berhenti melakukan pekerjaan, penting untuk tidak memecat anggota keluarga mereka dari perusahaan. Mempertahankan gaji anak-anak dan anggota keluarga mereka meningkatkan kemungkinan rencana remediasi dapat berlanjut.

Kembangkan Rencana Remediasi yang Mengamankan Kesejahteraan Anak

Sangat penting untuk mendengarkan dan menanggapi pandangan anak ketika menentukan pilihan remediasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Perusahaan perlu berupaya mendapatkan kesepakatan mereka untuk berpartisipasi dalam program remediasi serta menjaga kesadaran akan situasi yang dapat menimbulkan risiko dan mengelolanya.

Penting juga untuk menentukan pendekatan terbaik untuk usia anak. Anak-anak yang lebih tua di atas usia minimum meninggalkan sekolah dapat dibantu dengan mengakses pelatihan kejuruan dan memasuki pekerjaan yang sesuai dengan usia mereka, sementara anak-anak yang lebih kecil harus didukung dengan masuk kembali ke sekolah.

Rencana remediasi harus disepakati (ditandatangani) oleh perusahaan dan pihak yang terkena dampak untuk memformalkan kewajiban yang terkandung dalam rencana tersebut.

- **Membentuk tim remediasi, yang terdiri dari individu dan organisasi yang menangani pekerja anak dan kesejahteraan anak**

Individu dan organisasi yang memenuhi syarat dapat mencakup LSM setempat, anggota komite perempuan, pejabat pemerintah, tenaga profesional kesehatan dan pendidikan, pekerja sosial, atau individu berpengetahuan lainnya. Tim ini harus menjaga komitmen untuk memperhatikan kepentingan terbaik anak. Di Indonesia, ada beberapa badan pemerintah, LSM, dan inisiatif yang bekerja untuk menanggulangi pekerja anak. Karena itu, penting untuk memetakan dan memprioritaskan pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan upaya mengatasi masalah ini. Setelah para pemangku kepentingan diidentifikasi, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak harus ditentukan sambil menetapkan bagaimana program remediasi akan didanai.

- **Selidiki situasi anak, termasuk kebutuhan, keadaan, dan aspirasi anak**

Investigasi harus memasukkan dialog dengan anak dan orang tua untuk memahami pandangan dan keinginannya. Jika relevan, penting juga memahami mengapa anak tersebut berhenti sekolah dan memasuki dunia kerja dan segala hambatan yang mungkin ada untuk kembali bersekolah.

Jika anak tersebut menyatakan bahwa dia tidak ingin bersekolah, penting untuk memahami alasannya. Beberapa anak mungkin mengalami penindasan atau intimidasi di sekolah. Dalam kasus anak-anak migran, mereka mungkin menghadapi kesulitan dengan pendaftaran dan bahasa setempat. Memahami alasan di balik ketidakhadiran dapat memastikan bahwa anak tersebut dapat mengakses peluang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

- **Menentukan dan mengimplementasikan rencana remediasi yang tepat**

Memastikan kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama rencana remediasi.

Jika anak perlu dibantu untuk melanjutkan pendidikan, sekolah atau fasilitas pelatihan harus diidentifikasi sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Jika anak tersebut mendekati usia kerja minimum, pelatihan profesional/kejuruan dapat ditawarkan jika mereka memilih untuk kembali ke pekerjaan yang sesuai dengan usia.

Akomodasi yang sesuai harus tersedia bagi anak tersebut, terutama jika ia hidup tanpa orang tuanya. Jika anak tersebut tinggal jauh dari rumah, dengan atau tanpa keluarga mereka, sangat penting untuk menilai fasilitas pendidikan baik di tempat tinggal utama anak maupun di wilayah setempat.

Pemasok dapat setuju untuk mempekerjakan kembali anak tersebut ketika ia mencapai usia kerja yang sah, jika anak tersebut ingin bekerja kembali. Langkah ini memberi insentif kepada anak untuk menyelesaikan pendidikannya daripada mencari pekerjaan di tempat lain.

Penting juga mendapatkan perjanjian yang ditandatangani orang tua atau wali anak yang menjabarkan elemen atau tahapan rencana remediasi dan tugas masing-masing pihak.

Orang tua dan anak-anak harus selalu dikonsultasikan dan persetujuan mereka diperoleh untuk setiap rencana perbaikan sebelum diimplementasikan. Dalam kasus di mana orang tua telah mengirim anak mereka jauh dari rumah untuk bekerja, proses persuasi ini mungkin sulit dilakukan. Sangat penting untuk memastikan bahwa orang tua yakin bahwa pendapatan keluarga tidak akan berkurang ketika mereka berpartisipasi dalam rencana remediasi.

- **Mencapai kesepakatan tentang bagaimana biaya remediasi akan didanai**

Pemasok atau kontraktor harus mendanai semua biaya pendidikan dan biaya perjalanan untuk anak atau keluarganya. Pembiayaan ini harus berlanjut sampai anak mencapai usia kerja minimum atau menyelesaikan kursus pelatihan/pendidikan/bimbingan yang disepakati dalam program remediasi, yang mana pun yang paling lama.

Pemasok juga harus menanggung biaya untuk memonitor dan menindaklanjuti rencana remediasi. Untuk mencapai hal ini, pemasok sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk menutupi biaya remediasi.

Uang saku/tunjangan perlu dibayarkan kepada anak baik selama penyelidikan maupun sepanjang rencana remediasi diterapkan. Nilai uang saku ini harus setara dengan penghasilan anak saat dipekerjakan atau setidaknya standar upah minimum lokal (yang mana yang lebih tinggi). Uang saku dibayarkan secara mingguan atau bulanan, bukan sekaligus satu kali.

Dalam kasus anak-anak yang bekerja untuk membantu orang tua (misalnya kernet), harus ada upaya untuk mengembangkan pilihan solusi yang disepakati dengan anak dan keluarganya. Misalnya, mempekerjakan anggota keluarga dewasa yang menganggur sebagai pengganti pekerja anak mungkin dapat menjadi solusi berkelanjutan.

Pantau Implementasi Rencana Remediasi dan berikan Dukungan secara menerus kepada Anak

Remediasi yang berhasil bergantung pada pemantauan yang menerus untuk memastikan bahwa anak tetap bersekolah dan program disesuaikan untuk memenuhi kebutuhannya yang akan berubah-ubah.

Laporan pemantauan harus dikembangkan dan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan agar mendapat informasi secara rutin tentang kemajuan yang sudah dicapai untuk mendorong akuntabilitas.

Pemantauan mencakup elemen-elemen berikut:

- Pemantauan kemajuan anak di sekolah (*jika ada*);
- Kerja sama dengan orang tua atau petugas kesejahteraan anak untuk melakukan kunjungan rutin ke rumah dan sekolah;
- Pembayaran uang saku, biaya sekolah, dan pengeluaran lainnya secara teratur.

Temuan dari hasil pemantauan harus digunakan untuk memperkuat program remediasi.

- Kemitraan dan Kerja Sama

Kerja sama dengan LSM di komunitas sawit dapat memperkuat sistem pendidikan dan sistem kesehatan, sambil memastikan bahwa ketentuan pengasuhan anak dapat diterapkan bagi orang tua yang bekerja, misalnya dengan memastikan bahwa layanan ini disediakan di tempat yang mudah diakses dan sesuai dengan pola kerja mereka. Masyarakat yang lebih tangguh di sekitar lokasi kerja akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih kuat dan perkebunan yang lebih tangguh dan produktif. Jika dimungkinkan, Wilmar dapat membantu membawa pemasok ke dalam kemitraan dan kerja sama dengan pihak eksternal di mana Wilmar telah terlibat.

Penting juga untuk berinvestasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu yang mempengaruhi anak-anak di perkebunan serta membangun/meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi industri untuk belajar dari praktik-praktik terbaik yang ada dan merumuskan berbagai solusi.

- Akar penyebab Pekerja Anak

Saat bekerja untuk mengembangkan solusi-solusi jangka panjang, penting untuk memahami pendorong adanya pekerja anak, dengan mempertimbangkan keadaan anak, latar belakang ekonomi, dan kehidupan keluarga. Dengan dukungan ahli yang tepat yang mengenal dengan baik konteks dan masalah setempat, program remediasi dan pemantauan harus mempertimbangkan faktor-faktor pendorong tersebut untuk mencegah anak dari kembali memasuki dunia kerja sebelum waktunya. Dukungan spesialis mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan keadaan yang lebih luas.

Bacaan lanjut

- [ILO IOE Child Labour Guidance Tool for Business, 2015](#)
- [ILO Checkpoints for Companies: Eliminating and Preventing Child Labour, 2016](#)
- [ILO Age Verification: Protection for Unregistered Children from Child Labour, 2016](#)
- [ILO Helpdesk Q&As on Business and Child Labour](#)

LAMPIRAN I – Panduan Bergambar Mandiri untuk Menerapkan Perlindungan Anak di Estates



1. IDENTIFY CHILDREN AT RISK

A Collate

A LIST OF POTENTIALLY AFFECTED CHILDREN



B Clarify

AGE & IDENTITY OF CHILD



2. REMOVE THE CHILD FROM WORK IMMEDIATELY

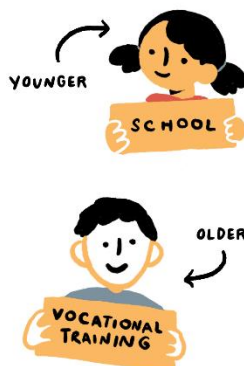
A Place

THE CHILD IN A SAFE ENVIRONMENT



B Transfer

CHILDREN INTO SCHOOL



C Ensure

THE COMPANY DOES NOT:



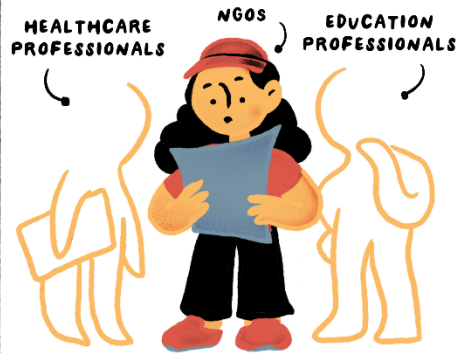
3. DEVELOP A PLAN THAT ENSURES THE CHILD'S WELLBEING

LISTEN AND RESPOND TO THE VIEWS OF THE CHILD TO ENSURE THAT THE CHILD'S BEST INTERESTS ARE CENTRAL TO THE PLAN.

IN ADDITION:



A ASSEMBLE A REMEDIATION TEAM



B INVESTIGATE THE SITUATION OF THE CHILD



C DEFINE AND IMPLEMENT THE PLAN, OBTAINING SIGNED AGREEMENTS FROM THE CHILD'S GUARDIANS.

INCLUDE:

- STAGES OF PLAN
- DUTIES OF EACH PARTY



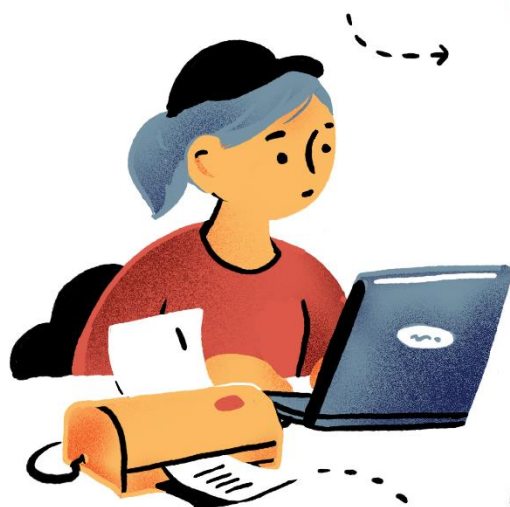
D REACH AN AGREEMENT ON HOW REMEDIATION COSTS WILL BE FUNDED



4. MONITOR THE PLAN & PROVIDE ONGOING SUPPORT

Successful Remediation

& MONITORING INCLUDES:



DEVELOP & DISTRIBUTE
MONITORING REPORT TO
STAKEHOLDERS TO ENCOURAGE
ACCOUNTABILITY.



CHECK UP ON THE
CHILD'S PROGRESS
AT SCHOOL



ADJUST
PROGRAMMING TO
MEET CHILD'S
CHANGING NEEDS

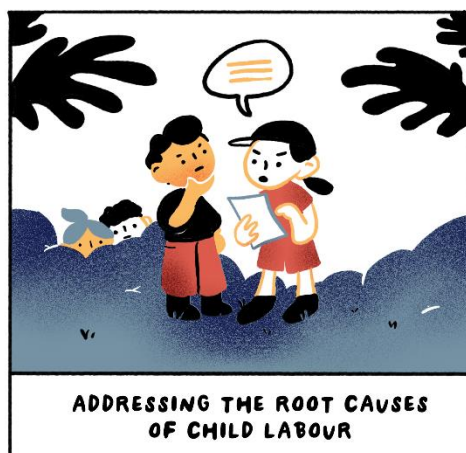


CONDUCT
REGULAR HOME
AND SCHOOL VISITS



PROVIDE REGULAR
PAYMENT OF
STIPENDS, SCHOOL
FEES AND ANY
OTHER EXPENSES

SUCCESSFUL REMEDIATION SHOULD BE SUPPORTED BY:





Wilmar International Limited

Co. Reg. No. 199904785Z

56 Neil Road

Singapore 088830

csr@wilmar.com.sg